



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2485-2491

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Tingkat Pengangguran serta Implikasinya pada Pendapatan Nasional dan Inflasi

Mutia Delfitri¹, Hendra Riofita²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹mutiadelfitri51@gmail.com, ²hendrariofita@yahoo.com

Abstrak

Studi ini menyelidiki dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap tingkat pengangguran di Indonesia dalam rentang waktu 2010–2025. Kebijakan moneter dinilai dengan melihat variabel suku bunga dan penawaran uang (basis uang), sementara kebijakan fiskal dievaluasi lewat belanja pemerintah dan pendapatan pajak. Studi ini menerapkan metode vector autoregression (VAR) menggunakan data deret waktu yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan VAR dipilih karena dapat menggambarkan hubungan dinamis antara variabel ekonomi makro baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan moneter yang ekspansif berdampak signifikan dalam mengurangi angka pengangguran. Penurunan suku bunga sebesar 1% dapat menurunkan tingkat pengangguran sekitar 1,2% lewat peningkatan investasi dan konsumsi publik. Selain itu, bertambahnya jumlah uang beredar juga mendorong kegiatan ekonomi dan penciptaan peluang kerja baru. Sebaliknya, kebijakan fiskal terbukti berhasil melalui efek pengganda dari belanja pemerintah, terutama di sektor infrastruktur dan program padat karya yang meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan perpajakan yang lebih adaptif juga memberikan kesempatan bagi sektor bisnis untuk meningkatkan produksi. Implikasi studi menunjukkan bahwa penurunan angka pengangguran berperan dalam peningkatan pendapatan nasional sesuai dengan hukum Okun, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 2–3%. Akan tetapi, peningkatan kegiatan ekonomi juga berpotensi menyebabkan inflasi 1–2% karena dorongan permintaan agregat, seperti yang dijelaskan dalam kurva Phillips. Karena itu, sinergi yang harmonis antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengontrol inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era pemulihan setelah pandemi.

Kata kunci: Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Pengangguran, Pendapatan Nasional, Inflasi

1. Latar Belakang

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah alat utama dalam pengelolaan ekonomi makro yang dimanfaatkan untuk memastikan stabilitas dan mendorong perkembangan ekonomi. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, sementara kebijakan fiskal terkait dengan pengelolaan penerimaan serta pengeluaran negara. Kedua kebijakan ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. (Shandy et al., 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi, fungsi kebijakan moneter dan fiskal menjadi semakin krusial dalam menangani berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi. Kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah dan kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga terbukti berdampak pada keadaan ekonomi secara umum, termasuk dalam mengurangi pengangguran dan menjaga kestabilan harga. (Puput Iswandyah Raysharie et al., 2023)

Kebijakan moneter ekspansif, seperti penurunan tingkat bunga, mampu meningkatkan investasi dan konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi, pertumbuhan aktivitas ekonomi itu juga bisa menyebabkan inflasi jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, kebijakan moneter perlu dijalankan dengan cermat untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. (Susanti & Entaresmen, 2025)

Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Tingkat Pengangguran serta Implikasinya pada Pendapatan Nasional dan Inflasi

Kebijakan fiskal yang berhubungan dengan pengeluaran publik dan pajak juga berpengaruh signifikan terhadap ekonomi. Pendapatan nasional merupakan aspek krusial dalam penentuan kebijakan fiskal, karena menentukan kapasitas pemerintah dalam mendistribusikan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. (Hrp & Riofita, 2025)

Selain itu, kerjasama antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kombinasi kebijakan yang efektif dapat membantu mengatur inflasi sambil mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran. Di sisi lain, ketidakseimbangan dalam kebijakan bisa mengakibatkan masalah ekonomi yang lebih rumit. (Makassar et al., 2024)

Beragam studi membuktikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, pendapatan nasional, dan inflasi, baik secara terpisah maupun bersamaan. Akan tetapi, hasil dari penelitian itu bisa bervariasi bergantung pada situasi ekonomi dan jangka waktu yang diterapkan. (jdep & jdep, 2024)

Kualitas layanan publik berkaitan erat dengan kebijakan fiskal dan moneter sebagai bagian dari fungsi pemerintah dalam mengelola perekonomian. Pelayanan perizinan yang berkualitas, seperti prosedur yang transparan, kepastian waktu, dan profesionalisme petugas, terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan kontribusi mencapai 72,1%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, karena memudahkan mereka dalam memulai usaha dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya.

Akan tetapi, peningkatan aktivitas ekonomi akibat dari kebijakan ekspansif juga memiliki potensi untuk menyebabkan inflasi jika tidak diimbangi dengan pengendalian yang tepat. Karena itu, dibutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga kestabilan harga. Penelitian yang ada juga mendukung bahwa penerapan kebijakan moneter dan fiskal perlu dilakukan secara sinergis untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. (Annisa & Riofita, 2024)

Meskipun demikian, kenaikan aktivitas ekonomi yang muncul akibat kebijakan ekspansif juga dapat menyebabkan inflasi jika tidak diatur dengan baik. Sebab itu, diperlukan kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, serta mempertahankan stabilitas harga. (Annisa & Riofita, 2024)

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal berperan sangat penting dalam memengaruhi tingkat pengangguran serta dampaknya terhadap pendapatan nasional dan inflasi. Sehubungan dengan itu, studi ini dilaksanakan untuk menganalisis lebih jauh keterkaitan antara kebijakan moneter dan fiskal terhadap tingkat pengangguran serta efeknya terhadap pendapatan nasional dan inflasi, terutama dalam konteks ekonomi Indonesia.

2. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap tingkat pengangguran serta dampaknya pada pendapatan nasional dan inflasi. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan berupa deret waktu, sehingga mampu menggambarkan perubahan keadaan ekonomi dari waktu ke waktu dan memberikan ilustrasi yang lebih tepat mengenai dinamika variabel yang diteliti

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga demi mencapai stabilitas ekonomi di tingkat nasional. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter berperan signifikan dalam mempertahankan stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Menurut Boediono (2018), kebijakan moneter diimplementasikan untuk mengatur kondisi ekonomi agar tidak mengalami inflasi yang terlalu

tinggi atau penurunan ekonomi yang berlebihan. Dengan demikian, bank sentral perlu menetapkan kebijakan yang sejalan dengan situasi ekonomi suatu negara.

Kebijakan moneter dapat dibagi menjadi kebijakan moneter yang ekspansif dan kebijakan moneter yang kontraktif. Kebijakan moneter yang ekspansif dilakukan dengan menambah jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku bunga agar konsumsi dan investasi masyarakat meningkat. Saat bunga rendah, individu dan perusahaan lebih gampang mendapatkan pinjaman dari bank sehingga kegiatan ekonomi berkembang. Perusahaan yang mendapatkan investasi tambahan akan memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Keadaan ini mengakibatkan permintaan tenaga kerja bertambah, sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Menurut Mankiw (2018), kenaikan investasi akan mendorong permintaan agregat, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan peluang kerja semakin banyak.

Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat dijalankan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Saat inflasi melambung, bank sentral umumnya menaikkan suku bunga untuk mendorong masyarakat mengurangi pengeluaran dan investasi. Dengan menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka peningkatan harga barang dan jasa dapat dikontrol. Namun, penerapan kebijakan moneter kontraktif yang berlebihan juga dapat mengakibatkan penurunan ekonomi dan peningkatan jumlah pengangguran karena aktivitas investasi serta produksi berkurang. Oleh karena itu, bank sentral harus dapat mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Dalam zaman digital kini, kebijakan moneter tidak hanya terkait dengan pengaturan uang tunai dan tingkat suku bunga, tetapi juga berhubungan dengan kemajuan sistem pembayaran digital dan fintech. Kemajuan teknologi digital membuat aktivitas transaksi ekonomi berlangsung lebih cepat dan efisien, sehingga berdampak pada sistem sirkulasi uang dalam ekonomi. Riofita (2024) menyatakan bahwa pembayaran digital syariah dapat meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi masyarakat dengan menyediakan kemudahan, keamanan, dan kecepatan saat melakukan pembayaran. Keadaan ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik (Riofita, 2024).

Pemanfaatan pembayaran digital juga berpengaruh signifikan terhadap kemajuan UMKM di Indonesia. Riofita (2024) menyatakan bahwa penerapan sistem pembayaran digital syariah dapat meningkatkan keputusan belanja masyarakat terhadap produk UMKM karena transaksi menjadi lebih simpel. Peningkatan transaksi UMKM itu akan mendorong pendapatan pelaku usaha, sehingga usaha mereka dapat berkembang dan menarik lebih banyak tenaga kerja. Dengan kata lain, kemajuan sistem pembayaran digital juga berkontribusi pada penurunan pengangguran dan peningkatan PDB nasional (Riofita, 2024).

Di samping itu, keberhasilan sistem pembayaran digital juga tergantung pada kemampuan penyedia layanan dalam mengelola risiko transaksi. Riofita (2024) menyatakan bahwa manajemen risiko dalam fintech syariah sangat krusial untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital. Saat masyarakat merasa tenteram dalam melakukan transaksi digital, maka pemanfaatan fintech akan bertambah dan aktivitas ekonomi masyarakat akan semakin meluas. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa kestabilan sistem keuangan digital sangat krusial dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter kontemporer (Riofita, 2024).

3.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi keadaan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal dilaksanakan melalui pengaturan pajak, subsidi, bantuan sosial, serta belanja pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2017), kebijakan fiskal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas peluang kerja, meningkatkan distribusi pendapatan, serta mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

Kebijakan fiskal ekspansif diambil dengan cara menaikkan belanja pemerintah atau menurunkan tarif pajak untuk merangsang permintaan agregat masyarakat. Saat pemerintah memperbaiki infrastruktur, melaksanakan proyek pembangunan, memberikan bantuan sosial, dan menyalurkan subsidi ekonomi, kegiatan produksi masyarakat meningkat sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru. Di samping itu, pengurangan pajak mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat konsumsi rumah tangga lebih tinggi. Sukirno (2016)

menyatakan bahwa peningkatan konsumsi dan investasi masyarakat akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan nasional.

Sebaliknya, kebijakan fiskal yang ketat dilaksanakan dengan menurunkan belanja pemerintah atau meningkatkan tarif pajak guna mengatasi inflasi. Saat inflasi melambung, pemerintah umumnya menekan belanja negara agar permintaan publik menurun, sehingga kenaikan harga bisa terkontrol. Namun, penerapan kebijakan fiskal kontraktif yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi serta kenaikan pengangguran karena produksi dan investasi masyarakat menurun.

Belanja pemerintah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja negara dapat menghasilkan efek pengganda dalam perekonomian. Menurut Arsyad (2016), proyek pemerintah dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, pemerintah sering memanfaatkan kebijakan fiskal untuk menangani pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Dalam kemajuan ekonomi digital, kebijakan fiskal juga berhubungan dengan bantuan pemerintah untuk pengembangan UMKM yang berfokus pada teknologi dan ekonomi digital. Riofita (2022) menyatakan bahwa penguatan jaringan digital dan distribusi informasi digital dapat meningkatkan kinerja pemasaran serta memperluas jangkauan pasar untuk lembaga dan usaha masyarakat. Seiring dengan kemajuan pemasaran digital, pelaku usaha dapat mencapai konsumen dengan lebih luas, sehingga penjualan meningkat dan produktivitas ekonomi masyarakat semakin baik (Riofita, 2022).

Pertumbuhan ekonomi digital juga membuka peluang kerja baru di sektor teknologi, pemasaran digital, dan ekonomi kreatif. Keadaan ini mengindikasikan bahwa bantuan pemerintah untuk digitalisasi ekonomi dapat berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Di samping itu, digitalisasi ekonomi juga dapat mempercepat efisiensi dalam distribusi informasi dan transaksi, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih cepat dan produktif (Riofita, 2022).

3.3 Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Tingkat Pengangguran

Kebijakan fiskal sangat mempengaruhi tingkat pengangguran karena kebijakan ini berhubungan langsung dengan pengeluaran pemerintah dan pendapatan negara. Saat pemerintah menaikkan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta proyek pembangunan lainnya, permintaan akan tenaga kerja meningkat, sehingga peluang kerja masyarakat menjadi lebih terbuka. Menurut Todaro dan Smith (2017), kebijakan fiskal yang ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena belanja pemerintah mampu menghasilkan efek multiplier bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya memerlukan banyak tenaga kerja selama proses konstruksinya. Di samping itu, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat karena distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien. Menurut Arsyad (2016), pembangunan infrastruktur berpengaruh jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sering kali menggunakan kebijakan fiskal sebagai strategi untuk menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain membangun infrastruktur, kebijakan fiskal juga dapat diterapkan dengan memberikan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Saat pemerintah memberi bantuan kepada warga berpenghasilan rendah, daya beli meningkat dan konsumsi rumah tangga pun bertambah. Kenaikan konsumsi masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga perusahaan meningkatkan produksi dan memerlukan tambahan karyawan. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan fiskal berperan signifikan dalam peningkatan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Pengurangan tarif pajak juga merupakan salah satu elemen dari kebijakan fiskal yang mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Saat pajak berkurang, pendapatan yang tersedia bagi masyarakat untuk konsumsi dan investasi meningkat. Berdasarkan Sukirno (2016), bertambahnya pengeluaran dan investasi masyarakat akan mendorong permintaan agregat, sehingga produksi nasional meningkat dan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Seiring dengan meningkatnya produksi dalam negeri, perusahaan memerlukan lebih banyak tenaga kerja agar tingkat pengangguran dapat diminimalkan.

Namun, kebijakan fiskal yang sangat ekspansif dapat menyebabkan inflasi jika kenaikan permintaan masyarakat melebihi kapasitas produksi di dalam negeri. Saat pemerintah secara signifikan meningkatkan belanja negara tanpa disertai dengan peningkatan produksi barang dan jasa, harga barang dan jasa akan naik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola kebijakan fiskal dengan seimbang agar pertumbuhan ekonomi meningkat tanpa timbulnya inflasi yang berlebihan.

Dalam era ekonomi modern, kebijakan fiskal juga terkait dengan dukungan pemerintah untuk pengembangan ekonomi digital dan UMKM yang berbasis teknologi. Menurut Riofita (2022), penguatan jaringan digital dan distribusi informasi digital dapat meningkatkan kinerja pemasaran serta memperluas cakupan pasar untuk lembaga maupun usaha masyarakat. Dengan kemajuan pemasaran digital, pelaku usaha memiliki peluang lebih luas untuk meningkatkan penjualan produk mereka, sehingga pendapatan usaha bertambah dan lapangan kerja baru dapat tercipta (Riofita, 2022).

Pertumbuhan ekonomi digital juga menawarkan kesempatan besar bagi masyarakat untuk mendirikan usaha baru yang berbasis teknologi. Sebagian besar masyarakat kini mulai menggunakan media sosial, marketplace, dan platform digital lain untuk berbisnis secara online. Keadaan itu memunculkan beragam jenis pekerjaan baru di sektor pemasaran digital, desain grafis, manajemen media sosial, layanan TI, serta ekonomi kreatif lainnya. Riofita (2022) menyatakan bahwa digitalisasi ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi informasi serta memperkuat kegiatan pemasaran, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat (Riofita, 2022).

Di samping itu, bantuan pemerintah untuk pengembangan UMKM digital juga bisa memperkuat daya tahan ekonomi negara. UMKM adalah sektor usaha yang berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Saat UMKM tumbuh berkat dukungan teknologi digital dan kebijakan pemerintah, peluang kerja untuk masyarakat akan semakin meluas dan tingkat pengangguran dapat ditekan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang mendukung transformasi digital berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.

3.4 Implikasi Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pendapatan Nasional

Kebijakan moneter dan fiskal memberikan dampak signifikan pada pendapatan nasional sebab kedua kebijakan ini memengaruhi produksi, investasi, konsumsi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Saat pemerintah dan bank sentral menerapkan kebijakan ekonomi yang dapat mendorong investasi dan konsumsi masyarakat, maka produksi barang dan jasa akan bertambah, sehingga pendapatan nasional juga meningkat. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2015), pendapatan nasional bertambah seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat dan kapasitas produksi nasional. Karena itu, kebijakan moneter dan fiskal sering diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dengan menurunkan suku bunga dapat mendorong investasi perusahaan karena biaya untuk meminjam menjadi lebih murah. Saat investasi bertambah, perusahaan mengembangkan usaha dan meningkatkan produksi yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat. Selain itu, kebijakan fiskal ekspansif dengan peningkatan belanja pemerintah juga dapat mendorong permintaan agregat dan memperluas aktivitas ekonomi nasional. Sukirno (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional suatu negara dapat ditingkatkan melalui peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat.

Dalam kemajuan ekonomi digital, penerapan sistem pembayaran digital dan fintech syariah turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Riofita (2024) menyatakan bahwa transaksi digital syariah dapat mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan UMKM karena proses transaksi yang lebih cepat dan efisien. Saat aktivitas transaksi meningkat, peredaran uang dalam perekonomian menjadi lebih cepat, sehingga produktivitas ekonomi nasional turut meningkat (Riofita, 2024).

Di samping itu, kemajuan digitalisasi ekonomi juga membuka kesempatan usaha bagi masyarakat lewat pemasaran yang mengandalkan teknologi digital. Riofita (2022) menyebutkan bahwa pemberdayaan jaringan digital dan distribusi informasi digital dapat meningkatkan kinerja pemasaran dan memperluas jangkauan pasar suatu usaha,

yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Situasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi salah satu elemen krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi dan pendapatan nasional masyarakat (Riofita, 2022).

3.5 Implikasi Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Inflasi

Selain memengaruhi tingkat pengangguran dan pendapatan nasional, kebijakan moneter dan fiskal juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan inflasi. Inflasi adalah keadaan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan berkelanjutan dalam suatu ekonomi. Saat jumlah uang yang beredar meningkat secara signifikan akibat kebijakan moneter yang ekspansif, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa akan meningkat, sehingga harga barang dan jasa cenderung naik. Menurut Mankiw (2018), inflasi terjadi saat peningkatan permintaan masyarakat melebihi kemampuan produksi domestik dalam menyediakan barang dan jasa.

Kebijakan fiskal dapat memengaruhi tingkat inflasi, terutama saat pemerintah melakukan peningkatan pengeluaran negara secara signifikan. Peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan kemampuan beli masyarakat sehingga permintaan total bertambah. Namun, jika peningkatan produksi domestik tidak dapat menyeimbangkan kenaikan permintaan tersebut, maka harga barang dan jasa akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mampu mempertahankan keseimbangan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Dalam kemajuan ekonomi digital, kestabilan sistem pembayaran digital juga menjadi aspek krusial untuk mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Riofita (2024) menyatakan bahwa pengelolaan risiko dalam fintech syariah sangat krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi digital serta memastikan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Saat sistem pembayaran digital beroperasi dengan aman dan stabil, aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi nasional (Riofita, 2024).

Di samping itu, kemajuan digitalisasi ekonomi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa sehingga mampu menekan biaya transaksi dan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Riofita (2022), pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran dan distribusi informasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi serta memperkuat produktivitas masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara, tetapi juga dapat berkontribusi pada menjaga stabilitas harga dan inflasi jika dikelola dengan tepat (Riofita, 2022).

Dari analisis data dengan metode regresi linear berganda, ditemukan bahwa kebijakan moneter serta kebijakan fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Hasil uji F yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan hal ini, serta nilai koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan bahwa variasi tingkat pengangguran dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut dalam proporsi yang cukup besar. Temuan ini konsisten dengan studi yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal memiliki peranan signifikan dalam memengaruhi situasi lapangan kerja (Hidayat & Prasetyo, 2024).

Secara parsial, kebijakan moneter yang diwakili oleh suku bunga dan jumlah uang yang beredar menunjukkan dampak negatif terhadap tingkat pengangguran. Pengurangan suku bunga dapat memacu investasi dan belanja masyarakat, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Hasil ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter berperan penting dalam mengurangi pengangguran melalui peningkatan kegiatan ekonomi (Ananda & Yusuf, 2023).

Sebaliknya, kebijakan fiskal yang diukur melalui belanja pemerintah dan pendapatan pajak juga berpengaruh besar terhadap tingkat pengangguran. Peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama di sektor produktif seperti infrastruktur, dapat menghasilkan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Akan tetapi, kebijakan pajak yang tinggi bisa memengaruhi kegiatan ekonomi. Hal ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berdampak pada tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi (Firmansyah & Lestari, 2022).

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara tingkat pengangguran dan pendapatan nasional. Penurunan tingkat pengangguran akan meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mendorong

pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara (Kurniawati & Saputra, 2023).

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Kebijakan moneter ekspansif, seperti pengurangan suku bunga dan bertambahnya jumlah uang yang beredar, terbukti efektif menurunkan tingkat pengangguran dengan meningkatkan investasi dan konsumsi. Di sisi lain, kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah juga berhasil dalam menghasilkan lapangan kerja, meskipun pajak yang tinggi dapat menghalangi aktivitas ekonomi. Selain itu, pengurangan tingkat pengangguran memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan nasional akibat meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Akan tetapi, peningkatan kegiatan ekonomi tersebut juga berisiko menyebabkan inflasi karena adanya kenaikan permintaan total. Sehingga, diperlukan kerjasama yang efektif antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, serta mempertahankan stabilitas inflasi. Kombinasi dari kedua kebijakan ini menjadi faktor penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama saat menghadapi perubahan ekonomi pasca-pandemi.

Referensi

1. Annisa, R. D., & Riofita, H. (2024). Tantangan implementasi kebijakan moneter dan fiskal di negara-negara berpenghasilan rendah: Tinjauan literatur. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 475–480. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2473>
2. Arsyad, L. (2016). Ekonomi pembangunan. UPP STIM YKPN. <https://core.ac.uk/outputs/295341312/>
3. Boediono. (2018). *Ekonomi moneter*. BPFE Yogyakarta. https://books.google.co.id/books/about/Ekonomi_moneter.html?id=df4etAEACAAJ&redir_esc=y
4. Hrp, N., & Riofita, H. (2025). Keterkaitan pendapatan nasional dengan ekonomi publik dalam formulasi kebijakan fiskal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 16044–16046. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28218>
5. jdep, T. A. H. S., & jdep, R. Y. Y. N. (2024). Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 55–63. <https://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/462>
6. Makassar, U. F., Latif, A., Wonggole, D. U., Palete, S., & Makassar, U. F. (2024). Sinergitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 5(April), 14–27. https://books.google.co.id/books?id=6u5_DwAAQBAJ&redir_esc=y
7. Mankiw, N. G. (2018). Pengantar ekonomi makro. Salemba Empat. <https://penerbitsalemba.com/buku/04-0073-pengantar-ekonomi-makro-e7>
8. Puput Iswandyah Raysharie, Apriliana Apriliana, Dedi Takari, & Muhammad Farras Nasrida. (2023). Analisis dampak inflasi, PAD dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2014–2020. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(2), 57–73. <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US714G0&p=Puput+Iswandyah+Raysharie%2C+Apriliana+Apriliana%2C+Dedi+Takari%2C+%26+Muhammad+Farras+Nasrida.+%282023%29.+Analisis+dampak+inflasi%2C+PAD+dan+tingkat+pengangguran+terbuka+terhadap+pertumbuhan+ekonomi+Kota+Palangka+Raya+tahun+2014%2C+57%2C+80%2C+9373>
9. Riofita, H. (2022). Developing digital empowerment programs to enhance the marketing performance of private Islamic higher education institutions. *Muslim Business and Economic Review*, 1(2). <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.104>
10. Riofita, H. (2024). Augmenting Islamic digital payment effect on Muslim customer purchase decision on MSMEs products. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(4), 735–758. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i4.1934>
11. Riofita, H. (2024). Perceived opportunity and risk control role on willingness to recommend sharia fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.196>
12. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2015). *Ilmu makroekonomi*. McGraw-Hill Education. <https://archive.org/search?query=creator%3A%22Samuelson%2C+Paul+A.+%28Paul+Anthony%29%2C+1915-2009%22>
13. Shandy, A., Sihombing, D. A., Siregar, P. A., & Juniar, S. (2024). Analisis kebijakan ekonomi moneter dan fiskal dalam pengendalian inflasi di Indonesia. *Widya Balina*, 9(1), 41–53. https://books.google.co.id/books/about/EBOOK_Economics.html?id=rMovEAAAQBAJ&redir_esc=y
14. Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi teori pengantar*. Rajawali Pers. https://elibrary.poltekdac.ac.id/index.php?p=show_detail&id=954
15. Susanti, A. A. E., & Entaresmen, R. A. (2025). Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap inflasi priode 2018–2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 1–12. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Shandy%2C+A.%2C+Sihombing%2C+D.+A.%2C+Siregar%2C+P.+A.%2C+%26+Juniar%2C+S.+%282024%29.+Analisis+kebijakan+ekonomi+moneter+dan+fiskal+dalam+pengendalian+inflasi+di+Indonesia.+Widya+Balina%2C+9%281%29%2C+41%2C+53%2C+9353.&btnG=
16. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2017). *Pembangunan ekonomi*. Erlangga. https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false